



**ANALISIS KETERKAITAN PERAN BKM TERHADAP MODAL SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PLP-BK DI
KELURAHAN PATI LOR**

Vega Kirana¹ dan Holi Bina Wijaya²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : vega.kiranaplano@gmail.com

ABSTRAK : Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah, (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) PLP-BK menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan partisipasi pembangunan. Dalam pelaksanaannya kegiatan PLP-BK dinaungi oleh lembaga masyarakat yang disebut BKM . Sebagai lembaga masyarakat yang mengurus PLP-BK, BKM memiliki peran penting agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Lembaga adalah modal dasar (Social Capital) yang dapat dipandang sebagai aset produktif. Melalui lembaga masyarakat mampu bekerja sama dengan masyarakat lainnya sehingga meningkatkan produktivitas anggotanya baik secara individu maupun keseluruhan (Kartodiharjo, 2005). BKM menjadi tumpuan agar kegiatan PLP-BK dapat berjalan secara terus-menerus (sustainable) dengan menumbuhkan modal sosial di dalam masyarakat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengetahui keterkaitan peran BKM terhadap modal sosial yang ada dalam masyarakat melalui program PLP-BK di Pati Lor. Kelurahan Pati Lor merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan PLP-BK dengan BKM Mekar Sari sebagai perwakilan masyarakat. BKM yang mampu melaksanakan peran dalam PLP-BK dapat menumbuhkan modal sosial masyarakat. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Adanya modal sosial dalam PLP-BK berguna untuk mencapai tujuan dan keberlanjutan program. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui beberapa keterkaitan antara peran BKM terhadap modal sosial sehingga diharapkan adanya pengoptimalan peran BKM agar modal sosial masyarakat Pati Lor berkembang dengan baik.

Kata kunci : Modal Sosial, Lembaga Masyarakat, PLP-BK

Abstract: As one of the government efforts to reduce poverty, Community Based Settle Arrangement Program known as PLP-BK becomes a program for public participation in development. The implementation of PLP-BK activities following the public agency called BKM (community self initiative agency). As a community institution, BKM has an important role to direct the achievement of activities. Community institution is part of social capital, which can regarded as a productive asset. Community agency can work together with other community members to improve the productivity both individually and community (Kartodiharjo, 2005). BKM become the platform for the activities of PLP-BK that can run continuously social capital in community. This study uses descriptive quatitatives method to determine the relevance of BKM roles in social capital of community through PLP-BK

program in Pati Lor Village. Pati Lor village is one of the area that is getting a PLP-BK with BKM Mekar Sari as community representatives. BKM is able to carry out the role of the PLP-BK to foster the social capital. Social capital binded the individuals in the form of norms, trust, and networks which produce mutual beneficial cooperation in order to achieve a common goal. The existence of social capital in the PLP-BK is useful to achieve sustainable goals and programs. The result of ths study is known some linkage between BKM roles with social capital, so expected the BKM roles to be optimizing in order to social capital in Pati Lor community well developed.

Keyword : *Social Capital, Social Institution, PLP-BK*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah besar yang dihadapi semua negara di dunia. Dalam tiap wilayah, kota, bahkan lingkungan selalu terdapat masalah kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak berdaya atas suatu hal yang diinginkannya. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan pilihan “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan public” sebagai salah satu indicator kemiskinan (Cahyat, 2004). Masyarakat miskin ini tidak memiliki pilihan untuk dapat hidup layak sebagaimana mestinya, dengan upaya maksimal mereka hanya mampu mendapatkan hasil yang minimal.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam yang tersedia namun terlebih pada ketimpangan sosial, rendahnya pendidikan, minimnya partisipasi mayarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, dan masih banyak alasan lainnya yang menyebabkan masyarakat Indonesia miskin. Masyarakat miskin ini dianggap sebagai masyarakat yang tidak berdaya yang tidak memiliki kemampuan,

pendidikan tinggi sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Penerapan prinsip partisipasi dalam pembangunan diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar mampu melaksanakan perencanaan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Partisipasi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat guna mengurangi kemiskinan adalah melalui kegiatan Pengembangan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Program PLP-BK berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar, dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang). Dalam kegiatan PLP-BK terdapat suatu kelembagaan masyarakat yang mengurus seluruh kegiatan masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Melalui BKM masyarakat dapat mengungkapkan ide dan gagasan mereka terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penataan lingkungan permukiman mereka. Sebagai lembaga masyarakat yang mengurus PLP-BK, BKM memiliki peran penting agar tujuan kegiatan dapat tercapai.

Lembaga adalah modal dasar (Social Capital) yang dapat dipandang sebagai aset produktif. Melalui lembaga masyarakat mampu bekerja sama dengan masyarakat lainnya sehingga meningkatkan produktivitas anggotanya baik secara individu maupun keseluruhan (Kartodiharjo, 2005). BKM menjadi tumpuan agar kegiatan PLP-BK dapat berjalan secara terus-menerus (sustainable) dengan menumbuhkan modal sosial di dalam masyarakat.

Salah satu lokasi kegiatan PLP-BK adalah Kelurahan Pati Lor. Tujuan dari pelaksanaan PLP-BK di Pati Lor adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya terkadang terdapat kekurangan yang dimiliki oleh berbagai pelaku baik BKM maupun peserta PLP-BK sehingga kegiatan PLP-BK tidak berjalan secara maksimal yang akhirnya membuat masyarakat enggan untuk turut serta lagi dalam partisipasi. Sebagai lembaga yang maungi masyarakat dalam kegiatan PLP-BK, BKM diharapkan mampu menjadi penggerak masyarakat agar lebih produktif dan bekerja sama dengan solid sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat dicapai. Hubungan antara pengentasan kemiskinan, kelembagaan dan modal sosial merupakan suatu konsep baru yang ingin diteliti oleh penulis.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah mengkaji peran kelembagaan lokal (BKM) dalam menciptakan modal sosial bagi masyarakat Kelurahan Pati Lor melalui PLP-BK. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan :

- Identifikasi proses pembentukan BKM
- Identifikasi karakteristik masyarakat peserta PLP-BK di Kelurahan Pati Lor
- Identifikasi tahapan proses PLP-BK di Kelurahan Pati Lor
- Analisis pelaksanaan PLP-BK di Kelurahan Pati Lor
- Analisis modal sosial kepercayaan masyarakat Pati Lor berupa (*trust*), pengorganisasian peran (*rules*), hubungan personal (*personal relation*) dan rasa tanggung jawab bersama (*common sense*)
- Analisis peran BKM dalam PLP-BK
- Analisis peran BKM terhadap modal sosial kepercayaan, pengorganisasian peran, hubungan personal, dan rasa tanggung jawab bersama masyarakat Pati Lor

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai hal-hal yang akan dibahas, antara lain : kemiskinan, partisipasi masyarakat, kegiatan PLP-BK, dan modal sosial.

- Kemiskinan

Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan seseorang atau masyarakat untuk dapat hidup selayaknya masyarakat di sekitarnya yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat dimana mereka dianggap sebagai orang tidak berdaya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Cahyat (2004) juga menyatakan bahwa di penghujung abad 20 muncul pengertian terbaru mengenai kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (voiceless).

- Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat *sustainable* (terus-menerus). Hal ini dikarenakan terdapat upaya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat miskin sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya mampu mengentaskan dari kondisi miskin. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternative solusi untuk menangani masalah, upaya mengatasi masalah maupun evaluasi perubahan yang terjadi.

- Lingkungan Permukiman

Permukiman tidak sekedar lingkungan yang menjadi tempat tinggal namun juga sebagai tempat penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dimana dalam lingkungan permukiman tersedia pekerjaan yang mampu meningkatkan ekonomi serta sebagai media belajar untuk meningkatkan sumberdaya dan kualitas masyarakat sebagaimana pendapat ahli di bawah ini.

Blaang (1986) merumuskan bahwa permukiman adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional, ekonomi dan fisik tata ruang yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana secara umum dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan sumber daya dan dana, mengolah lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan peningkatan mutu kehidupan manusia, member rasa aman, tenang dan nikmat, nyaman dan sejahtera dalam keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah

yang dapat melayani kehidupan pribadi keluarga masyarakat bangsa dan negara.

Menurut Soedarsono (dalam Blaang, 1986) permukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.

Menurut C.A Doxiadis (dalam Blaang 1986) mendefinisikan konsep permukiman sebagai penataan kawasan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingannya, dengan tujuan untuk bertahan hidup.

- PLP-BK

Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) adalah intervensi lanjutan dari P2KP, program ini merupakan stimulan bagi keberhasilan masyarakat di kelurahan-kelurahan sasaran program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat (BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi "BKM Berdaya menuju Mandiri" atau "BKM Mandiri".

Pengertiannya tidak sebatas pembangunan fisik saja, tetapi didalam kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), masyarakat berencana dan membangun tatanan kehidupan warganya berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama. Dengan demikian Lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras dan lestari merupakan wujud dari budaya masyarakatnya.

Berdasarkan pedoman teknis PLP-BK oleh Dirjen Cipta Karya PLP-BK bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman,

dan sehat. Tujuan tersebut akan dicapai dengan memujudkan :

- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan, dan integrasi perencanaan pembangunan;
- Penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang; dan
- Peningkatan sarana, prasarana, dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin.

- Lembaga

Kelembagaan sosial merupakan terjemahan dari istilah *social institution*. Koentjaraningrat (1994) menyebut kelembagaan sosial sebagai pranata sosial, yaitu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dalam sosiologi, yang dimaksud dengan kelembagaan sosial atau sosial institution adalah “suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting”.

Institusi masyarakat merupakan modal dasar (*social capital*) yang dapat dipandang sebagai aset produktif. Melalui institusi masyarakat mampu bekerja sama dengan masyarakat lainnya sehingga meningkatkan produktivitas anggotanya baik secara individu maupun keseluruhan. Sedangkan kerusakan institusi masyarakat mendorong terjadinya eksploitasi alam dikarenakan modal sosial masyarakat telah berkurang (Kartodiharjo, 2005).

Dalam PLP-BK terdapat lembaga yang menaungi seluruh kegiatan masyarakat yaitu BKM. BKM merupakan wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarkan aspirasi dan

kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

- Kelembagaan dalam PLP-BK

Kegiatan PLP-BK dilaksanakan melalui suatu lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya yang disebut dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (atau yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat disingkat BKM), yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*social capital*) kehidupan masyarakat.

BKM bersama masyarakat bertugas menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (dikenal dengan PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat. BKM memiliki unit pelaksana di bawahnya, yaitu Unit Pelaksana Sosial, Unit Pelaksana Lingkungan dan Unit Pelaksana Keuangan. Unit-unit pelaksana ini berada di bawah BKM dan bertanggung jawab kepada BKM. BKM juga bertanggung jawab untuk menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan

kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.

Sesuai dengan modul tugas-fungsi BKM dalam PLP-BK yang disusun oleh dirjen cipta karya terdapat tugas-tugas BKM dalam PLP-BK yang berhubungan dengan masyarakat antara lain:

- Melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJM
- Mengambil keputusan dalam kegiatan PLP-BK sesuai dengan masukan dari masyarakat
- Menerapkan nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan demokratis dalam pengambilan keputusan.
- Memprakarsai kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengembangkan jaringan
- Menetapkan kebijakan dan mengawasi pemanfaatan BLM
 - Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) dipahami sebagai suatu bentuk di mana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian didalamnya.

Putnam (1995: 2) mengartikan modal sosial sebagai perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu hubungan sosial (*networks of civic engagement*) ikatan/ jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas, tidak hanya yang memberi pendapatan yang diinginkan (*desireable outcome*) melainkan juga hasil tambahan (*undesirable outcome*).

Fukuyama (2002) menyatakan bahwa modal sosial dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai-nilai, norma yang terbagikan (*shared*) dalam dan antar anggota suatu komunitas yang menjalin dan terjalin kerjasama (*cooperation*). Nilai-nilai tersebut menyangkut kepercayaan (*trust*) maupun kejujuran yang kemudian nilai-nilai ini menjadi penggerak kelompok agar bekerja lebih efisien.

Sejalan dengan itu semua Solow (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapasitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan prouktivitas.

Menurut World Bank (1998), modal sosial adalah masyarakat yang memiliki lembaga, hubungan, norma, dan nilai yang menatur interaksi antar manusia dan memberikan kontribusi pembangunan sosial ekonomi. Namun, modal sosial tidaklah sederhana hanya sebagai jumlah dari seluruh institusi yang ada, namun ia adalah juga semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Dalam *social capital* dibutuhkan adanya "nilai saling berbagi" (*shared values*) serta pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (*personal relationships*), kepercayaan (*trust*), dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama; sehingga masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan individu belaka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai peran kelembagaan dalam PLP-BK dan pengaruhnya terhadap modal sosial di Desa Pati Lor diawali dari rendahnya pendapatan yang diperoleh warga sehingga menimbulkan suatu gagasan untuk melakukan suatu perubahan yang mampu memberikan masukan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dibentuknya lembaga lokal berupa BKM yang kemudian memunculkan ide untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program PLP-BK menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di Desa Pati Lor. Peran BKM dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk ikut turut berpartisipasi PLP-BK. Semakin baik peran BKM maka warga akan semakin antusias untuk mengikuti PLP-BK.

TEMUAN STUDI

- Analisis Penilaian Masyarakat mengenai Pelaksanaan PLP-BK

Analisis ini menggunakan tiga kriteria penilaian yang hasilnya sebagai berikut:

- Masyarakat berpendapat terdapat peningkatan produktivitas masyarakat dalam hal kapasitas, kemitraan, dan perencanaan yang disebabkan oleh adanya PLP-BK. Masyarakat menyatakan mendapatkan pekerjaan dan tambahan modal dikarenakan adanya PLP-BK.
- Masyarakat menyatakan terdapat penataan lingkungan miskin seperti pembangunan jalan yang dilakukan karena adanya PLP-BK. Pembangunan pembangunan jalan di lingkungan miskin yang menjadikan masyarakat miskin merasa lebih nyaman dalam beraktivitas dan memiliki akses yang lebih lancar.

- Sebagian besar masyarakat menyatakan ada peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan akibat adanya PLP-BK. Namun beberapa tidak setuju menyatakan peningkatan sarana prasarana hanya berupa jalan.

- Analisis Modal Sosial dalam Masyarakat

Kondisi modal sosial masyarakat Pati Lor menunjukkan sebagian besar penilaian mengenai modal sosial di dalam masyarakat menunjukkan hasil yang tinggi dan hanya beberapa aspek saja yang menunjukkan nilai sedang yaitu kepercayaan masyarakat kepada BKM dan penyampaian aspirasi masyarakat oleh BKM. Hal ini menunjukkan telah terdapat modal sosial di dalam masyarakat yang cukup kuat.

- Analisis Peran BKM dalam Pelaksanaan PLP-BK

Dari Peran BKM dalam pelaksanaan PLP-BK di Kelurahan Pati Lor sebagai dewan pengambilan keputusan dan sebagai prakarsa kegiatan pemberdayaan memperoleh hasil yang tinggi. Namun, hasil mengenai peran BKM yang lainnya masih menunjukkan nilai sedang, dimana masyarakat menganggap peran BKM tersebut belum berjalan secara optimal terutama pada pelibatan masyarakat secara partisipatif serta penerapan nilai kejujuran, transparansi, dan demokratis dalam pengambilan keputusan.

Hal ini dapat disimpulkan sementara jika peran BKM sebagai dewan pengambilan keputusan memiliki nilai yang tinggi namun keputusan yang diambil belum melibatkan partisipasi dan demokrasi masyarakat.

- Analisis Pengaruh Peran BKM terhadap Modal Sosial Masyarakat

Terdapat keterkaitan peran BKM dalam pelaksanaan PLP-BK di Pati Lor terhadap adanya modal sosial masyarakat Pati Lor.

Hasil analisis menunjukkan beberapa tingkatan keterkaitan peran BKM terhadap modal sosial.

Dari gambar tersebut kita dapat mengkategorikan variabel peran BKM berdasarkan tingkatan keterkaitan yang dimiliki dengan beberapa modal sosial.

1. Kategori A

Di dalam kategori ini variabel peran BKM memiliki lebih dari 1 keterlibatan terhadap modal sosial. Variabel peran BKM yang berada dalam kategori ini antara lain menerapkan nilai dalam pengambilan keputusan dengan 4 keterlibatan dengan modal sosial dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJM dengan 2 keterlibatan.

2. Kategori B

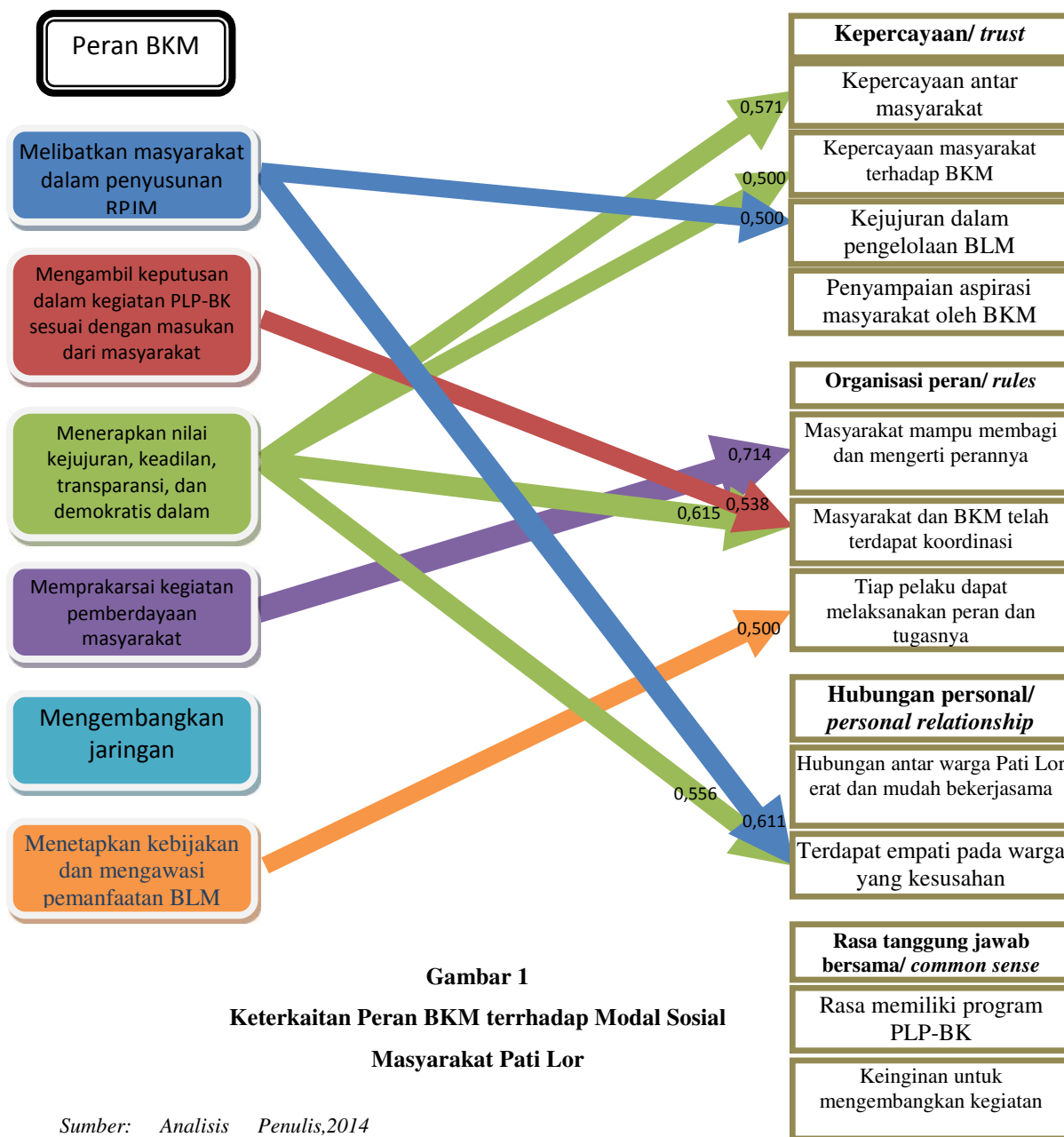
Kategori ini terdiri dari variabel peran BKM yang hanya memiliki 1 keterlibatan terhadap modal sosial. Variabel peran BKM dalam kategori ini antara lain: dewan pengambilan keputusan, prakarsa kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan menetapkan kebijakan dan mengawasi pemanfaatan BLM.

3. Kategori C

Kategori ini merupakan variabel peran BKM yang tidak memiliki keterkaitan terhadap modal sosial. Yang berada dalam kategori ini hanya variabel peran BKM dalam pengembangan jaringan. Hasil yang menunjukkan bahwa pengembangan jaringan tidak terkait dengan modal sosial apapun bertentangan dengan pendapat Woolcok dan Narayan (2000: 6)

“Bertambahnya ikatan atau jaringan kesatuan yang terjadi diantara orang-orang, organisasi, dan grup-grup masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal menyebabkan kuatnya persatuan dan kerjasama dalam grup tersebut”.

Peran BKM mampu menciptakan adanya modal sosial dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat North (dalam Woolcock dan Narayan, 2000: 10) bahwa modal sosial yang ada di masyarakat sekarang ini merupakan bentukan dari lingkungan politik, hukum, dan kelembagaan. Kapasitas dan keinginan seseorang untuk bekerja dalam sebuah grup/kelompok sesuai dengan kepentingan kolektif tergantung pada kualitas lembaga formal tempat mereka berada. Hubungan keterkaitan antara variabel peran BKM terhadap modal sosial dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1
 Keterkaitan Peran BKM terhadap Modal Sosial Masyarakat Pati Lor

Sumber: Analisis Penulis, 2014

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan kesimpulan mengenai PLP-BK di Kelurahan Pati Lor Sebagai Berikut :

1. Kegiatan PLP-BK di Kelurahan Pati Lor menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pati Lor melalui kegiatan pemberdayaan miskin. Kegiatan ini diapresiasi oleh masyarakat dengan baik dengan melihat latar belakang peserta baik dari usia, ekonomi,
- 2.

- pendidikan serta asal baik dari dalam maupun luar wilayah.
3. Respon dan sikap masyarakat terhadap program PLP-BK cukup baik, masyarakat memberikan penilaian baik mengenai pelaksanaan PLP-BK. Masyarakat berpendapat setelah adanya program PLP-BK terdapat peningkatan produktivitas masyarakat, adanya penataan lingkungan miskin serta peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman miskin.
 4. Masyarakat menilai telah terdapat modal sosial yang cukup kuat di dalam masyarakat terutama pada organisasi peran (*rules*), hubungan personal (*personal relationship*), dan rasa tanggung jawab bersama (*common sense*). Namun pada aspek kepercayaan (*trust*) masih terdapat penilaian sedang, yakni pada kepercayaan masyarakat terhadap BKM. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa BKM belum mampu menyampaikan aspirasi dan ide masyarakat.
 5. Masyarakat menilai BKM telah berperan dengan baik dalam hal BKM sebagai prakarsa kegiatan pemberdayaan dan dewan pengambilan keputusan. Untuk peran BKM lainnya seperti peran BKM dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan partisipatif, BKM sebagai pengembang jaringan, penerapan nilai kejujuran, keadilan dan demokratis dalam pengambilan keputusan masih mendapatkan penilaian yang sedang oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap BKM belum berperan secara optimal terutama pada pelibatan masyarakat secara partisipatif dan demokrasi dalam pengambilan keputusan.
 6. Peran BKM mempengaruhi adanya modal sosial masyarakat Pati Lor. Peran BKM ini berpengaruh terhadap adanya kepercayaan, hubungan personal, dan hubungan personal.
 7. Terdapat beberapa kategori tingkatan keterkaitan antara peran BKM terhadap modal sosial dalam pelaksanaan PLP-BK di Pati Lor. Yaitu:
 - Kategori A: variabel peran BKM memiliki lebih dari 1 keterlibatan terhadap modal sosial. Variabel peran BKM yang berada dalam kategori ini antara lain menerapkan nilai dalam pengambilan keputusan dengan 4 keterlibatan dengan modal sosial dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJM dengan 2 keterlibatan.
 - Kategori B: variabel peran BKM yang hanya memiliki 1 keterlibatan terhadap modal sosial. Variabel peran BKM dalam kategori ini antara lain: dewan pengambilan keputusan, prakarsa kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan menetapkan kebijakan dan mengawasi pemanfaatan BLM.
 - Kategori C: variabel peran BKM yang tidak memiliki keterkaitan terhadap modal sosial. Yang berada dalam kategori ini hanya variabel peran BKM dalam pengembangan jaringan.

5.1 Rekomendasi

Berdasarkan kajian dan hasil temuan penelitian serta kesimpulan yang didapatkan, maka didapatkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kegiatan PLP-BK merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat sehingga perlu diperhatikan bahwa partisipasi masyarakat disini tidak sekedar keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan, tetapi juga dalam penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan.
2. Masyarakat sebagai pelaku PLP-BK sebaiknya mengerti konsep pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, sehingga masih diperlukan pendampingan dari fasilitator agar masyarakat mengerti dan terbiasa dengan pemberdayaan yang dilakukan.
3. Diperlukan pengoptimalan peran BKM terutama pada peran menerapkan nilai dalam pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan terbesar terhadap modal sosial. Hal ini dilakukan agar modal sosial masyarakat Pati Lor dapat berkembang dengan baik. Melalui modal sosial yang telah terbangun dengan baik maka tujuan dari kegiatan PLP-BK dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat tercapai.
4. Belum adanya bahasan mengenai bagaimana peran BKM berkembang dalam program PLP-BK, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan judul Analisis perkembangan Peran BKM dalam Program PLP-BK di Kelurahan Pati Lor untuk mengetahui bagaimana peran BKM dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Djemabut Blaang. 1986. Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Cahyat, A. 2004. *Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia. Governance Brief No.2*. Bogor: CIFOR
- Departemen Pekerjaan Umum. 2008. *Modul Khusus Komunitas Tugas dan Fungsi BKM/ BLM PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jendral Cipta Karya. 2009. *Pedoman Teknis Penataan Lingkungan permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum
- Fukuyama. F. 2000. *The Great Disruption: Human Nature and Reconstitution of Social Order*. New York: Simon & Schuster.
- Isbandi, Adi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press
- Kartodihardjo, Harijadi, dkk. 2005. *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Yayasan KEHATI.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Putnam, Robert D. 1995. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy*, January 1995, pp. 65-78.
- Solow, Robert. 1999. *Notes on Social Capital and Economic Performance. In Dasgupta, P., Serageldin, I. (Eds), Social Capital. A Multifaceted Perspective*. Washington: The World Bank
- Woolcock, Michael and Narayan, Deepa. 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy." *World Bank Research Observer* Vol. 15 (2).

World Bank. 1998. "The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding". *Social Capital Initiative Working Paper No. 2*. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network. June 1998.